

FIQH LOCAL WISDOM (IMPLEMENTASI ETIKA KERUKUNAN UMAT DI JAWA TIMUR)

Idrus

idruss0009@gmail.com

Universitas Nurul Jadid, Paiton-Probolinggo

ABSTRAK

Keragaman agama, etnis, dan budaya, merupakan modal social yang memiliki daya dukung positif bagi kurukunan umat beragama, tetapi sekaligus juga bisa berpotensi menimbulkan konflik yang justru akan menghambat bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian dalam masyarakat yang majemuk dan multi-etnik, bisa terjalin keharmonisan di satu sisi, sementara disisi yang lain juga bisa terjadi pertentangan dan konflik. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat (khususnya pada masyarakat tertentu) telah memiliki sejumlah instrument dan mekanisme peredam konflik tersendiri, salah satunya melalui mekanisme kearifan local (local wisdom).

Kata Kunci: **Keragaman, Konflik, dan Kearifan Lokal**

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah ditakdirkan oleh Allah Tuhan yang maha Esa sebagai sebuah bangsa dengan corak masyarakat yang majemuk (*pluralistic society*). Kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia ditandai dengan ciri yang bersifat *horizontal* dan *vertical*.

Ciri kemajemukan horizontal, tampak pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta kedaerahan. Kemajemukan ini disebabkan oleh beberapa factor. *Pertama*, Keadaan geografis yang membelah wilayah Indonesia menjadi ribuan pulau, ratusan suku bangsa besar dan kecil, ratusan

kelompok puak/etnis, dan ratusan bahasa. *Kedua*, Posisi Indonesia yang berada diantara dua benua dan diapit oleh dua samudera, dapat berpengaruh terhadap geopolitik dan geokultur Indonesia. *Ketiga*, Kondisi alam dan struktur tanah yang berbeda-beda diantara berbagai daerah kepulauan, sehingga menciptakan pola dan cara hidup serta tradisi yang tidak sama.

Sedangkan *ciri kemajemukan vertical*, adalah gambaran lain struktur masyarakat Indonesia, yang berbentuk perbedaan-perbedaan lapisan/strata social seperti lapisan atas dan bawah. Pelapisan social yang amat kentara antara lain tampak pada sejumlah orang berdasarkan kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomis, politis, dan pendidikan.¹

Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, memiliki penduduk sekitar 37.687.622 jiwa.² Dilihat dari *topografi dan demografi*-nya memiliki komposisi penduduk yang padat dan sangat dinamis dengan tingkat *heteroginitas* (keberagaman) yang sangat beragam, baik dari latar belakang agama maupun sosio-budayanya. Dari aspek topografi dan demografi menunjukkan bahwa komposisi penduduknya terdiri dari penduduk yang beragama *Islam* (95,53%), *Kristen-Protestan* (2,20%), *Katholik* (1,32%), *Hindu* (0,60%), *Budha* (0,34%), *Konghucu* (0,01%), dan lainnya (0,01%).³

Secara *Sosio-budaya* dapat dikelompokkan menjadi *delapan wilayah kebudayaan (tlatah)* dengan ciri masing-masing, yaitu Jawa Mataraman, Jawa Panaragan, Arek, Samin, Tengger, Osing, Pandalungan, Madura Pulau, Madura Bawean dan Madura Kangean.

¹ J. Furnifall dalam Abdullah Idii 2008, dalam Sewindu FKUB Provinsi Jawa Timur, 2014 : 4-5.

² Sumber : Buku Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 : 9, dalam Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur, 2013 : 18 – 19.

³ Sumber : Provinsi Jawa Timur Dakam Angka 2012 : 74, dalam Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur, 2013 : 19.

Wilayah Mataraman, adalah wilayah di bagian barat yang beresebelahan dengan Jawa Tengah, sehingga secara sosio-budaya wilayah ini mirip wilayah Jawa Tengah. *Wilayah Panaragan*, berkembang di daerah Ponorogo, yang sebenarnya masih merupakan bagian dari wilayah Mataraman. *Wilayah Arek*, adalah wilayah dibagian tengah Jawa Timur, dari Gresik di utara hingga Malang di selatan. *Wilayah Samin*, adalah wilayah kecil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibelahan barat Kabupaten Bojonegoro. *Wilayah Tengger*, seperti namanya berada di sekitar Gunung Tengger dengan pusatnya di daerah Gunung Bromo. *Wilayah Osing*, berada di ujung timur Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi. *Wilayah Pandalungan*, yang merupakan campuran antara budaya Jawa dan Madura, berada di antara wilayah Arek dan wilayah Osing. Sedangkan *Wilayah Madura dan Madura Kepulauan*, berada di Pulau Madura dan kepulauan di sekitar Pulau Madura.

Meskipun ada pembagian wilayah-wilayah secara sosio-kultural tersebut, karena pemutasian social, masyarakat Jawa Timur sebenarnya bercampur, terutama di Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur.⁴

Keragaman agama, etnis, dan budaya, merupakan *modal social* yang memiliki daya dukung positif bagi kurukunan umat beragama, tetapi sekaligus juga bisa berpotensi menimbulkan konflik yang justru akan menghambat bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian dalam masyarakat yang majemuk dan multi-etnik, bisa terjalin keharmonisan di satu sisi, sementara disisi yang lain juga bisa terjadi pertentangan dan konflik. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat (khususnya pada masyarakat tertentu) telah memiliki sejumlah *instrument dan mekanisme peredam konflik* tersendiri, salah satunya melalui *mekanisme kearifan local (local wisdom)*.

⁴ Ayu Sutarto dan Setya Yuwono Sudikan, dalam Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, 2004, dalam Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur, 2014 : 19-21.

B. KEARIFAN LOKAL: MAKNA, FUNGSI, ILUSTRASI, PROFIL DESA KERUKUNAN)

Kearifan local (local wisdom, local indigenous, local knowledge), dimaknai sebagai, suatu daya upaya yang dilakukan oleh penduduk asli suatu daerah dalam memberlakukan lingkungan alam dan social sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tersebut tanpa merusak kelestarian dan keseimbangan lingkungan tersebut.⁵

Kearifan local, (juga dapat) merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan berupa *a)*. Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi social baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan herarki dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata kerama dalam kehidupan sehari – hari ; *b)*. Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Contoh : sasi darat, dan sasi laut di Maluku ; *c)*. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang ghaib, misalnya Tuhan dan roh-roh ghaib. . . . Kearifan local, (juga) dapat berupa adat istiadat, institusi, kata bijak, dan pepatah.⁶

Dalam pandangan John Baba, sebagaimana dikutip oleh Abdullah, bahwa *kearifan local setidaknya-tidaknya memiliki ENAM FUNGSI Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan local tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur cultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. *Keempat*, kearifan local memberi warna kebersamaan bagi semua komunitas. *Kelima*, kearifan local akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik

⁵ Ruhpina, 2005, Bismillah, 2010 : 1, Rachmadani, 2011, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.X/No.3, 2011 : 665.

⁶ Haidlor Ali Ahmad, 2011, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VIII/No.30, 2011 : 166.

individu dan kelompok, dengan meletakkan diatas *common ground* (kebudayaan) yang dimiliki. *Keenam*, kearifan local dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan , apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh diatas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.⁷

Sebagai ILUSTRASI dapat di ketahui sejumlah *kearifan lokal* pada beberapa etnis/suku/masyarakat di wilayah Indonesia, antara lain :

Etnis Dayak, kearifan local yang dimiliki dan menjadi acuan orang Dayak antara lain, "*Penyang hinye simpe patarunghumba tambura*", artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Juga "*Rumah Betang*" (atau rumah panjang), rumah ini telah membentuk dan mempersatukan penghuninya dalam komunitas, dan berperan penting dalam pelaksanaan upacara adat. Keadaan dan suasana rumah betang memudahkan setiap warga mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat, bergaul secara harmonis dan mengurangi kecemburuan social.

Etnis Banjar, memiliki pedoman hidup diperantauan sebagaimana acuan yang biasa digunakan oleh *Etnis Minang dan Etnis Melayu*, yaitu "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*", artinya, dimana kita menetap atau tinggal, maka adat istiadat dan tata aturan penduduk setempat harus dihormati.

Etnis Jawa, masyarakat Jawa memiliki tradisi apabila terjadi perdecekan lebih mengalah, karena orang yang mengalah akan memperoleh keluhuran di kemudian hari (*yen ana apa-apa luwih becik ngalah, wong ngalah luhur wekasane*). Juga "*tepo seliro*"(sikap tenggang rasa) merupakan kearifan local orang Jawa, sehingga dalam pergaulan mereka lebih suka menerapkan perilaku, "*isa rumangsa, ora rumangsa isa*"

⁷ Abdullah, 2008 : 8, dalam Rachmadani, 2011, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.X/No.3, 2011 : 665.

(bisa merasa dan tidak merasa bisa). Artinya, orang Jawa lebih menggunakan perasaan, dan cenderung tidak menonjolkan diri.⁸

Masyarakat Poso, sepanjang sejarah (sebelum terjadinya peristiwa berdarah 25 Desember 1998), masyarakat Poso hidup dalam suasana “*mosintuwu*” (tolong menolong). Sejak ratusan tahun lalu, dalam fenomena kehidupan sehari-hari masyarakat Tanah Poso tidak mengenal adanya sekat-sekat ataupun diskriminasi antara penduduk asli dan pendatang, antara yang seagama dan yang berbeda agama. Hal itu terlihat dalam acara perkawinan, upacara kematian, membuka lahan perkebunan/persawahan, pada waktu musim tanam atau saat musim panen, dan pada waktu mendirikan rumah tinggal. Setiap anggota masyarakat akan ‘merasa bersalah’ atau ‘merasa telah melanggar kebiasaan’, apabila tidak memberi “*posintuwu*” (barang pemberian) yang bisa berupa kehadiran atau turut menyumbangkan tenaga atau bingkisan sesuai keberadaannya.⁹

Etnis Batak dan Sumatera Utara, memiliki salam khusus, yaitu “*Salam Kerukunan*” yang dibiasakan dalam setiap moment pertemuan. Sebagai bagian dari kearifan local khususnya dalam menjaga hubungan antar umat beragama. Sedangkan dalam menangani konflik ditempuh antara lain dengan “*konsep dalihan natolu*” (tiga tungku), yaitu system musyawarah kekerabatan dalam bentuk marga.¹⁰

Khusus Jawa Timur, ada tambahan dari *local wisdom Etnis Jawa* diatas antara lain sbb: *Noto roso among karso mijil tresno agawe guyub rukun lan santoso* (Sesama umat beragama diharapkan dapat berusaha menata perasaan dan mengendalikan diri sehingga terbangun sikap saling menghormati, bersatu, rukun, kuat, dan sejahtera). *Mangan ora mangan kumpul. Holopis kuntul baris. Gotong royong. Guyub lan rukun. Arek*

⁸ Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VI/No.23, 2007 : 127 - 129

⁹ Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VIII/No.30, 2009 : 174-175.

¹⁰ Catatan Perjalanan Kunjungan Silaturahmi FKUB Provinsi Jawa Timur ke Sumatera Utara, dilaporkan oleh Abdul Hadi Ar, 2014 : 9.

(Malang , Surabaya). *Ter-teran penganan antar tangga. Saling kunjung/anjangsana. Halal bihalal. Musyawarah mupakat.*¹¹

C. PROFIL DESA KERUKUNAN DI JAWA TIMUR

Merujuk kepada substansi *makna/pengertian, fungsi, ilustrasi kearifan local/local wisdom* pada sejumlah etnik di Nusantara termasuk di Jawa Timur diatas; maka akan lebih lengkap bila kita “*Menengok Profil Desa Kerukunan di Ngepeh Ngoro Jombang*”, sebagai salah satu khazanah kekayaan *local wisdom* di Jawa Timur yang kita miliki, selain di 37 wilayah Kabupaten/Kota yang lain.

Suasana *keharmonisan kehidupan social dan kerukunan antar umat bergama* di desa Ngepeh ditandai antara lain oleh berdirinya *bangunan rumah-rumah ibadat* yang berdekatan lokasinya dari pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. Sehari-hari tetap berfungsi sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan masalah. Dalam kehidupan warganya seperti sudah terbiasa *mengedepankan sikap toleransi/saling memahami/menghargai/ menghormati atas keberadaan/ eksistensi masing-masing, dimana perlu saling membantu dan bekerjasama dalam kehidupan sosial*. Bahkan saat perayaan hari besar keagamaan, mereka *saling hantar-menghantar penganan, saling beranjangsana untuk bermaafan*. Ada sebuah media sebagai sarana mempererat kerukunan warga, yaitu *Radio Komunitas Suara Budi Luhur yang lebih dikenal dengan Rakom SBL*. Ada forum pertemuan dan dialog berkala yang melibatkan sejumlah unsur termasuk generasi muda lintas agama. Juga berdiri sebuah *koperasi sebagai badan usaha bersama*, untuk menunjang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan para warganya. Walhasil, *substansi makna dan fungsi kearifan local* sebagian besar sepertinya *sudah terekam di desa Ngepeh ini*. Hanya seiring dengan dinamisasi perkembangan kemajuan dan tuntutan lingkungan strategik, maka *tetap*

¹¹ Hasil diskusi perumusan local wisdom Jawa Timur oleh FKUB Jawa Timur, 2012

*diperlukan revitalisasi kearifan local agar suasana keharmonisan dan kerukunan dinamis warganya dapat terpelihara.*¹²

D. REVITALISASI KEARIFAN LOKAL

Agaknya tidak mudah bagi masyarakat manapun, untuk dapat mempertahankan budaya, adat istiadat, tradisi, kearifan local / local wisdom yang mereka miliki tetap utuh seperti aselinya. Dalam suatu penelitiannya, Ahmad (2007) menyatakan bahwa, kearifan yang dimiliki sekelompok masyarakat mungkin masih ada yang bisa dan patut dilestarikan karena masih fungsional dan sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin juga ada kearifan local yang masih dijadikan acuan oleh masyarakat pendukungnya kendatipun sudah tidak sesuai dan tidak mampu lagi untuk menjawab tantangan zaman. Tidak sedikit pula, *kearifan local yang hilang* bersama hilangnya perangkat-perangkat serta kondisi - kondisi pendukungnya, seperti *rumah betang*, karena secara fisik rumah betang sudah banyak di gantikan dengan rumah tunggal. Komunitas keluarga penghuni rumah betang juga sudah tidak ada. Sehingga kearifan local rumah betang secara utuh juga sudah tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk itu, *revitalisasi atau institusional development* (reka cipta kelembagaan) '*kearifan local baru*' yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat , terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan '*kerukunan dalam kehidupan beragama*' sangat mendesak untuk dilakukan. Apalagi di daerah yang pernah terjadi konflik terbuka seperti di Palangkaraya ini. Tentu dalam upaya ini sepatutnya *tidak meninggalkan unsur-unsur atau filosofi kearifan local yang pernah ada.*¹³

¹² Dalam artikel "Menengok Profil Desa Kerkunan di Ngepeh, Ngoro, Jombang, Abdul Hadi AR, Bulletin FORUM, Edisi 6, Agustus 2014, hal. 25 – 27.

¹³ Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural &Multireligius Vol.VI?no.23, 2007 : 133.

Beberapa Pendekatan Untuk Mengadakan Revitalisasi Kearifan Lokal, antara lain:

Pendekatan *social capital* yang pernah diperkenalkan di dunia sosiologi oleh James Coleman dan dikembangkan oleh ekonom Francis Fukuyama dalam bukunya *The Great Disruption : Human Nature And The Reconstruction of Social Order* (1999) dapat dijadikan acuan untuk membangun *harmoni social keagamaan*. Menurut Fukuyama, *social capital* adalah eksistensi seperangkat tata nilai atau norma yang disepakati dan diterapkan bersama (*shared norms*) antar anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Apabila anggota suatu kelompok masyarakat mengharapkan anggota kelompok lain berperilaku seperti yang dia lakukan maka harus ada sikap saling percaya satu sama lain (*trust*). Secara lebih gamblang dijabarkan oleh Putnam (dalam Fukuyama, 1999) bahwa *social capital mangacu pada collective values of all social networks*.¹⁴

Sejalan dan sekaligus melengkapi pendekatan *social capital*-nya Coleman dan Fukuyama dalam Revitalisasi Kearifan Lokal diatas, Ahmad (2009) dalam hasil penelitiannya di Poso (wilayah yang dulu damai lalu terjadi konflik) antara lain menyatakan bahwa, 'Perlu adanya *revitalisasi kearifan local* dengan melakukan *institusional development* wadah kerukunan. Untuk ini, perlu dikembangkan : *Pertama*, pengembangan *wadah kerukunan* yang kuat (semacam wadah dialog atau FKUB, Pen.). Wadah ini harus merupakan forum komunikasi kelompok-kelompok yang secara murni menghendaki kerukunan. Untuk itu, wadah harus memiliki kejelasan orientasi (visi dan misi) yang dapat diprogramkan. *Kedua*, pengembangan *system norma*, atau *perangkat pengaturan ikhwil norma dan nilai* tentang ekspektasi serta preskripsi dan proskripsi yang diperlukan. Sistem norma dan nilai yang dibangun niscaya harus mempresentasikan

¹⁴ Bahrul Hayat dalam tulisannya 'Konsepsi Pengembangan Kerukunan Ideal Umat Beragama Indonesia Ke Depan', dalam Jurnal Kerukunan Lintas Agama Vol.2 No.1, 2008 : 88.

prinsip-prinsip kejelasan orientasi, relevansi dengan kebutuhan, keadilan bagi semua pihak, kebersamaan, dan kepraktisan'.¹⁵ Jadi, *prinsip revitalisasi kearifan local*, setidaknya memiliki dua substansi pokok, yaitu adanya wadah atau forum untuk saling bisa berdialog, berinteraksi, bermusyawarah, dan mengadakan kegiatan bersama. Serta adanya *social capital*, yaitu seperangkat tata nilai atau norma yang disepakati bersama (*shared norms*) antar anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Di Jawa Timur, di samping FKUB sudah eksis dan berperan, juga disepakatinya Etika Kerukunan Umat Beragama .

E. IMPLEMENTASI ETIKA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI JAWA TIMUR MENYONGSONG LOCAL WISDOM AWARDS ;

Etika Kerukunan Umat Beragama, adalah acuan moral dalam berfikir, bersikap, dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal serta nilai-nilai universal, dalam menjalankan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimaksudkan, untuk memberikan acuan moral bagi pemeluk agama di Jawa Timur dalam bertindak, bersikap, dan mengekspresikan diri dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Sedangkan tujuannya, adalah tercapainya hubungan sesama umat beragama yang rukun, damai, dan tentram di Jawa Timur yang didasarkan pada tanggung jawab bersama. Adapun substansi Etika Kerukunan Umat Beragama yang perlu kita implementasikan adalah :

¹⁵ Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VIII/No.30, 2009 : 179.

1. Sikap toleransi, saling pengertian, menghormati dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama di wujudkan dalam bentuk :
 - a. Memahami dan menghormati keberadaan agama-agama serta memberikan hak hidup berdampingan,
 - b. Memahami dan menghormati perbedaan ajaran atau peribadatan pemeluk agama-agama sebagai wujud pengabdian terhadap keyakinan agama yang dipeluknya dengan memperhatikan fatwa dari majelis agama masing-masing,
 - c. Menghormati kebebasan pemeluk agama-agama untuk menjalankan perintah agamanya dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta peraturan perundangan yang berlaku,
 - d. Menghargai ekspresi kreativitas keagamaan dalam bentuk pemikiran, seni dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat umum yang berlaku,
 - e. Menghormati eksistensi dan aktivitas organisasi keagamaan dengan landasan etika keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - f. Mencegah berkembangnya misi (dakwah) agama yang menggunakan cara-cara paksaan, menghasut, atau intimidasi, serta cara-cara terselubung lainnya sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat,
 - g. Mencegah terjadinya misi (dakwah) agama yang bertujuan untuk menghasut, menebar kebencian, dan menodai agama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga menciptakan suasana disintegrasi ditengah-tengah masyarakat,
 - h. Mengedepankan penyelesaian kesalah pahaman, perselisihan atau konflik antar dan intern umat beragama melalui musyawarah dan kabupaten/Kota, dan Provinsi,

2. Sikap Bekerjasama, yakni kesediaan melakukan pekerjaan secara bersama-sama sesama umat beragama dengan didasari niat untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan bersama terhadap hal-hal sbb :
 - a. Mengembangkan komunikasi dan dialog antar dan intern umat beragama dalam rangka menciptakan sikap saling pengertian dan memahami perbedaan masing-masing agama,
 - b. Menciptakan kerukunan hidup sesama umat beragama dengan mengembangkan tradisi hubungan kekeluargaan intern dan antar umat beragama dilingkungan masyarakatnya,
 - c. Kerjasama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi dengan umat agama-agama sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan per undang-undangan yang berlaku,
 - d. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial bersama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai dengan jalan meningkatkan kualitas bimbingan kepada umatnya masing-masing untuk diarahkan berbuat kebaikan dan menganjurkan untuk saling menghormati umat agama-agama,
 - e. Mengembangkan mutu sumber daya manusia umat, untuk diarahkan pada peningkatan skill atau ketrampilan ekonomi produktif sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta peraturan per undang-undangan yang berlaku,
 - f. Membantu kesulitan sesama pemeluk agama saat membutuhkan bantuan atau petolongan dalam misi kemanusiaan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya serta peraturan per undang-undangan yang berlaku,
 - g. Menciptakan kenyamanan bersama dalam masyarakat pada umumnya dan pemeluk agama pada khususnya dengan cara turut mengawasi atau mencegah penggunaan media massa, baik cetak maupun

elektronik untuk kepentingan misi (dakwah) agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan peraturan per-undang-an yang berlaku. 16)

F. MANFAAT KERUKUNAN UMAT MANUSIA

Dengan disadarinya suatu perbedaan-perbedaan oleh setiap komponen bangsa, maka hendaknya perbedaan-perbedaan tersebut dikelola dengan bijaksana atau dikelola sebaik-baiknya agar terhindar dari suatu konflik integral maupun konflik horizontal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, yang selanjutnya diharapkan terciptanya suatu kerukunan ummat manusia.

Manfaat adanya kerukunan ummat manusia Indonesia antara lain ;

1. Dapat terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, jujur dan adil untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tertera pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945
2. Dapat terselenggaranya pembangunan nasional untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertera pada Alinea II Pembukaan UUD 1945
3. Dapat dikelola kembali Trilogi Pembangunan Nasional, berupa tercapainya suatu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan dilaksanakannya pemerataan pembangunan beserta pemerataan hasil-hasil pembangunan.
4. Terciptanya suatu kondisi yang aman dan damai sehingga dapat dengan lancar melaksanakan kegiatan sehari-hari berupa melaksanakan pekerjaan guna memperoleh pendapatan, dan dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan khusu', tertib dan lancar, sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
5. Terciptanya suatu kondisi kesetiakawanan sosial antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat.

G. BEBERAPA PERAN DALAM TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT

1. Ketaatan mengamalkan Pancasila

Pengamalan Pancasila yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 secara bulat dan utuh yang menjadi kepribadian bangsa

Indonesia, akan mampu menciptakan rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, rasa senasib-sepenanggungan mendorong sikap gotong royong, tolong-menolong, sesama anak bangsa. sila dalam Pancasila yang relevan dalam hal ini adalah:

a. Sila Persatuan Indonesia

Salah satu sila dari dasar negara RI (Pancasila) ialah sila Persatuan Indonesia yang menjadi pilar utama dari pilar lainnya dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Dalam sila Persatuan Indonesia tersirat makna rasa persatuan bangsa dan kesatuan jiwa Indonesia. Pribahasa Indonesia yang berbunyi “Bersatu kita teguh, dan bercerai kita runtuh”.

Pada kondisi terciptanya rasa persatuan bangsa dan kesatuan jiwa merupakan perwujudan bangsa Indonesia dalam mengaplikasikan rasa kasih sayang antar sesama komponen anak bangsa, maka rasa persamaan dan kebersamaan mampu diciptakan guna mencapai suatu kerukunan, kedamaian, keamanan, keselamatan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, sikap gotong royong, sikap saling membantu dalam rangka mencapai tujuan bersama yakni tujuan nasional Indonesia melalui proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa Indonesia yakni untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan RI.

Secara teoritis bahwa terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa membawa kepada suatu negara yang mempunyai kondisi stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya negara tersebut akan mampu melaksanakan pembangunan nasionalnya guna mewujudkan cita-cita bangsa berupa pencapaian suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang indikasinya terciptanya pertumbuhan ekonomi (*economic of growth*) yang tinggi, dan pemerataan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dimaksud, baik secara materiil ekonomi yang menimbulkan kesejahteraan (*economic welfare*) maupun kesejahteraan spirituil (*spiritual welfare*) yang berkelanjutan.

b. Bhinneka Tunggal Ika

Dengan karakteristik bangsa Indonesia yang *heterogen (pluralisme)*, seperti terdapat banyaknya etnis (suku bangsa), banyaknya Agama resmi dan banyaknya kepentingan antar komponen bangsa dan pihak asing terhadap Indonesia, sangatlah bijaksana jika kita memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ujungnya ialah persatuan Indonesia, dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang terdapat dalam gambar Burung Garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia yang artinya ; walaupun berbeda-beda namun tetap satu untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai.

Ingat negara besar di masa lalu yang saat ini tidak ada lagi dalam peta dunia ialah Negara Majapahit (akibat konflik intern dan perang saudara) dan Negara Unisovyet dengan program *Glasnost & Perestroika* (Keterbukaan & Restrukturisasi/Pembaharuan).

Pengalaman sejarah Negara Besar tersebut, perlu menjadikan kita mawas diri dan introspeksi diri dengan program *reformasi* dan *transparansi* yang agak mirip dengan program *Glasnost & Perestroika* tersebut. Waspadalah wahai anak bangsa Indonesia.

2. Kerukunan antara Pemerintah dengan Ummat beragama.

Peran Kita sebagai ummat beragama, hendaknya saling bersinergi dengan Peran Pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Ummat beragama yang diwakili oleh Organisasi Para Pemuka Agama selaras, serasi, dan seimbangan dengan Umara (Pemerintah) untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai anggota ummat beragama, mentaati hal-hal yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah dan wakil-wakil kita.

3. Kerukunan antar Ummat Ber-agama

Dari keenam Agama resmi, dan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang ada di Indonesia, memang sangat jelas terdapat perbedaannya, terutama dalam hal aqidah (konsep tentang Tuhan), Keadaan ini sebenarnya berpotensi terjadinya suatu konflik, oleh karena itu sebagai penganut salah satu agama hendaknya saling hormat-menghormati, dan saling mengembangkan sikap toleransi dalam

menggunakan kesempatan melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinannya, karena keyakinan terhadap salah satu agama dan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang dianutnya, merupakan salah satu hak azasi manusia (HAM) seseorang. Saya sebagai salah satu ummat Islam mengajak ummat Islam hendaknya mengamalkan QS ; Al Baqarah ayat 256 dan QS ; Al Kaafiruun ayat 6 yang intinya mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati ajaran keagamaan yang dianut oleh setiap orang. Dengan sikap toleransi dan saling menghormati antar ummat beragama, maka akan tercipta suatu kerukunan dan kedamaian serta kebersamaan dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.

4. Kerukunan antar Ummat Se-agama

Dalam kehidupan ummat se-agama, juga banyak terdapat perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya berdasarkan mazhab atau aliran-aliran yang diyakininya. Hal ini juga berpotensi besar terjadinya konflik, oleh karena itu sebagai penganut salah satu mazhab atau aliran hendaknya saling hormat-menghormati, dan saling mengembangkan sikap toleransi dalam menggunakan kesempatan melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinannya, karena keyakinan terhadap salah satu mazhab atau Aliran yang dianutnya, juga merupakan salah satu hak azasi manusia (HAM) seseorang.

Saya sebagai salah satu ummat Islam mengajak kepada ummat Islam hendaknya mengamalkan QS ; Al Baqarah ayat 139 dan QS ; Al Qashas ayat 55 yang intinya mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati ajaran keagamaan berupa keyakinan terhadap amalan yang diyakini oleh setiap orang. Dengan sikap toleransi dan saling menghormati antar ummat se-agama, maka akan tercipta suatu kerukunan dan kedamaian serta kebersamaan dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.

5. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Indonesia sebagai Negara Hukum, memberikan kebebasan kepada warga negara-nya untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum sebagai hak azasi manusia (HAM) yang dipayungi oleh UU No. 9/ 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

Agar dalam pelaksanaan UU tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum tersebut, hendaklah dilaksanakan secara konsisten, mengingat dalam UU tersebut juga mengatur tentang Hak Azasi Manusia dari orang lain. Kondisi ini sebenarnya berpotensi timbulnya suatu konflik horizontal dari berbagai komponen anak bangsa.

Untuk menghindari terjadinya konflik, maka hendaknya setiap anak bangsa melaksanakan UU ini secara konsisten, juga konsisten terhadap rambu-rambu yang termuat dalam KUHAP pasal 315 – 325 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik.

6. Menggiatkan sikap 5 S

Sikap 5 S ini ialah sebagai perwujudan toleransi dari kepribadian bangsa Indonesia dalam mengamalkan Sila Persatuan Indonesia. 5 S ini merupakan singkatan dari ; Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.

Prilaku pergaulan dengan dan antar sesama anak bangsa bersikap murah Senyum, maka akan mendorong untuk saling mendo'akan dengan mengucapkan Salam. Ucapan salam ini akan mendorong terciptanya suatu komunikasi berupa saling Sapa.

Sapa dengan aplikasi secara Sopan artinya berperilaku sesuai situasi dan kondisi selanjutnya ditambah dengan pribadi yang Santun (saling hormat menghormati), maka akan tercipta suatu rasa persaudaraan yang akhirnya akan tercipta suatu kerukunan antar sesama anak bangsa, kerukunan antara pemerintah dengan ummat ber-agama, kerukunan antar ummat ber-agama, dan kerukunan antar ummat se-agama.

Jadi, Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, dapatlah kita nyatakan bahwa Kerukunan Antar Ummat Manusia sangatlah bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, oleh karena itu untuk terciptanya suatu kerukunan antar ummat manusia Indonesia, hendaklah kita menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang telah kita anut secara kaffah, dan kaitannya dengan kerukunan antar ummat manusia Indonesia itu, dengan menggiatkan dan melakukan Sikap 5 S ini ialah sebagai perwujudan toleransi dari kepribadian bangsa Indonesia dalam

mengamalkan Sila Persatuan Indonesia. 5 S ini merupakan singkatan dari ; Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun

H. KORELASI ANTARA LOCAL WISDOM, ETIKA KUB, dan LOCAL WISDOM AWARDS

Keberhasilan implementasi Etika Kerukunan Umat Beragama ini, sangat tergantung kepada goodwill dan partisipasi aktif Pengurus FKUB di semua lini. Serta dukungan positif dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemenag, Majelis-majelis Agama, Ormas Keagamaan, Ormas-ormas dan LSM Kerukunan, Pilar-pilar Kerukunan Perempuan dan Generasi Muda, Mass-media, dan semua instansi/pihak yang terkait.

Ada korelasi positif (yang berpola simbyuse – mutualistik) antara Local Wisdom (LW) dengan Etika Kerukunan Umat Beragama (E- KUB). Keberhasilan implementasi E-KUB (sebagai bahagian dari *social capital* -nya Fukuyama dan Rekomlit-nya Ahmad) akan memperkuat Revitalisasi LW. Sebaliknya keberhasilan Revitalisasi LW akan memperlancar implementasi E-KUB. Contohnya, dapat dilihat di wilayah yang damai dan wilayah yang berkonflik. Oleh karena itu, kita perlu menggali lebih banyak lagi wilayah-wilayah LW (semacam Ngepoh) di semua daerah di Jawa Timur, agar E-KUB dapat tumbuh lebih subur.¹⁶

Kemampuan kita untuk menggali potensi dan memperkuat LW, sejalan dengan dan sekaligus mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2015 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2014 – 2019, khususnya pada Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Pada intinya Misi ini, untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk didalamnya kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,

¹⁶ Buku Etika kerukunan Umat Beragama, FKUB Provinsi Jawa Timur, yang sudah di sahkan dalam Rakerda FKUB Se-Jawa Timur, 2013.

sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁷

Jadi, local wisdom awards adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap keberhasilan revitalisasi (penguatan) kearifan lokal (local wisdom) di daerah yang didalamnya social capital (termasuk etika kerukunan umat beragama) dapat terimplementasikan secara efektif.

I. P E N U T U P

Sebagai penutup akhiran tulisan ini, beberapa rekomendasi para tokoh agama di Jawa Timur sebagai implementasi etika kerukunan umat beragama tahun 2018 khususnya dalam menghadapi Pileg/Pilpres 2019 sebagai esensi dari fiqh local wisdom

1. NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah kesepakatan Umat Islam bersama seluruh komponen Bangsa, merupakan ikhtiar bangsa Indonesia dalam memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan hidup bersama. Kesepakatan tersebut mengikat bagi seluruh elemen bangsa dan merupakan tanggungjawab keagamaan yang harus dipatuhi, dijaga, dan diamankan.
2. Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila-sila yang lain, merupakan unsur asasi dalam berbangsa dan bernegara. Maka agama harus dijadikan sumber inspirasi, landasan berfikir, dan kaedah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berfikir keagamaan dan kerangka berfikir kebangsaan.

¹⁷ Hasil Musrenbang Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

3. Keberagaman atau kebhinnekaan pada dasarnya adalah anugerah Allah Swt kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri dan dikelola sebagai kekuatan dan keunggulan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti yang telah disampaikan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam menyikapi keberagaman perlu dibangun sikap saling menghormati, berempati, dan penuh kasih sayang sebagai sesama manusia, serta sikap toleransi dalam arti tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain yang berbeda agama, sikap tenggang rasa, tidak mencampur aduk ajaran agama, tidak menodai agama, tidak mencampuri urusan internal masing-masing agama yang berbeda, dan kesiapan untuk patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama.
4. Mendorong penanganan berbagai problem sosial dan penegakan hukum secara berkeadilan, serta memotong kesenjangan di berbagai bidang untuk menuju kesejahteraan bersama secara adil dan merata. Karena diyakini bersama bahwa penanganan problem-problem sosial yang kurang berkeadilan serta adanya kesenjangan sosial ekonomi yang justru secara dominan menjadi sumber konflik yang sebenarnya, termasuk konflik yang seolah-olah seperti konflik agama.
5. Berkomitmen bersama untuk tetap menjaga suasana kondusif khususnya di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah, Pileg, dan Pilpres secara langsung dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Furnifall dalam Abdullah Idii 2008, dalam Sewindu FKUB Provinsi Jawa Timur, 2014 : 4-5.
Sumber : Buku Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 : 9, dalam Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur, 2013 : 18 – 19.
Sumber : Provinsi Jawa Timur Dakam Angka 2012 : 74, dalam Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur, 2013 : 19.

- Ayu Sutarto dan Setya Yuwono Sudikan, dalam Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, 2004, dalam Etika Kerukunan Antar Umat Beragama di Jawa Timur, 2014 : 19-21.
- Ruhpina, 2005, Bismillah, 2010 : 1, Rachmadani, 2011, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.X/No.3, 2011 : 665.
- Haidlor Ali Ahmad, 2011, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VIII/No.30, 2011 : 166.
- Abdullah, 2008 : 8, dalam Rachmadani, 2011, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.X/No.3, 2011 : 665.
- Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VI/No.23, 2007 : 127 - 129
- Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VIII/No.30, 2009 : 174-175.
- Catatan Perjalanan Kunjungan Silaturahmi FKUB Provinsi Jawa Timur ke Sumatera Utara, dilaporkan oleh Abdul Hadi Ar, 2014 : 9.
- Hasil diskusi perumusan local wisdom Jawa Timur oleh FKUB Jawa Timur, 2012
- Dalam artikel “Menengok Profil Desa Kerkunan di Ngepeh, Ngoro, Jombang, Abdul Hadi AR, Bulletin FORUM, Edisi 6, Agustus 2014, hal. 25 – 27.
- Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VI?no.23, 2007 : 133.
- Bahrul Hayat dalam tulisannya ‘Konsepsi Pengembangan Kerukunan Ideal Umat Beragama Indonesia Ke Depan’, dalam Jurnal Kerukunan Lintas Agama Vol.2 No.1, 2008 : 88.
- Haidlor Ali Ahmad, dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol.VIII/No.30, 2009 : 179.
- Buku Etika kerukunan Umat Beragama, FKUB Provinsi Jawa Timur, yang sudah di sahkan dalam Rakerda FKUB Se-Jawa Timur , 2013.
- Hasil Musrenbang Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015